

**IMPLIKASI KKP *WEB* TERHADAP
PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN
(Studi di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh:

SUCI PARAMITA SARI
NIM. 11202586/M

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2015**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kebaruan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	17
1. Pelayanan Pertanahan.....	17
2. KKP <i>Web</i>	23
3. Implikasi.....	28
B. Kerangka Pemikiran.....	31
C. Hipotesis.....	33

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	34
	B. Lokasi Penelitian.....	36
	C. Jenis dan Sumber Data.....	36
	1. Data Primer.....	36
	2. Data Sekunder.....	37
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
	1. Wawancara.....	38
	2. Observasi.....	39
	3. Studi Dokumen.....	40
	4. Akses Internet.....	40
	E. Populasi, Sampel, dan Variabel.....	40
	F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA MOJOKERTO	
	A. Gambaran Umum Kota Mojokerto.....	48
	1. Letak Geografis.....	48
	2. Luas dan Pembagian Wilayah.....	48
	3. Topografi.....	51
	4. Penduduk.....	51
	5. Penggunaan Tanah.....	54
	B. Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.....	55
	1. Gambaran Umum.....	55
	2. Sumberdaya Manusia.....	57
	3. Pelayanan Pertanahan.....	58
BAB V	PENERAPAN APLIKASI KKP <i>WEB</i> DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MOJOKERTO	
	A. KKP <i>Web</i> di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.....	63
	B. Pelayanan Peralihan Hak Jual Beli, Pemecahan Bidang Tanah, dan Pemisahan Bidang Tanah Menggunakan	

KKP <i>Web</i> di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.....	66
1. Pelayanan Peralihan Hak Jual Beli.....	66
2. Pelayanan Pemecahan dan Pemisahan Bidang Tanah.....	69
C. Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi KKP <i>Web</i> yang Dijalankan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.....	74
1. Kelebihan Aplikasi KKP <i>Web</i>	74
2. Kekurangan Aplikasi KKP <i>Web</i>	77
D. Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Aplikasi KKP <i>Web</i> di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.....	78
 BAB VI IMPLIKASI PENERAPAN APLIKASI KKP <i>WEB</i> TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MOJOKERTO	85
A. Kuantitas Penyelesaian Pekerjaan Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.....	85
1. Pelayanan Peralihan Hak Jual Beli.....	86
2. Pelayanan Pemecahan Bidang Tanah.....	88
3. Pelayanan Pemisahan Bidang Tanah.....	89
B. Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.....	89
1. Pelayanan Peralihan Hak Jual Beli.....	91
2. Pelayanan Pemecahan Bidang Tanah.....	93
3. Pelayanan Pemisahan Bidang Tanah.....	96
C. KKP <i>Web</i> dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.....	97
 BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**IMPLICATION OF KKP WEB
ON THE IMPLEMENTATION OF LAND SERVICE
(A Study at Mojokerto City Land Office Province of East Java)**

By: Suci Paramita Sari

ABSTRACT

KKP Web is a computerization system carried out by Ministry of Agrarian and Spatial/National Land Agency in its effort to improve service quality for community. One of land office that has applied KKP Web in carrying out its service to community is Mojokerto City Land Office. This research's objectives were to learn the implementation of KKP Web and its implication on land service at Mojokerto City Land Office.

Method used in this research was qualitative with descriptive approach (first problem formulation) and used combination method between quantitative and qualitative method with sequential explanatory approach (second problem formulation). Its data type was primary data through interviewing 8 (eight) research subjects at Mojokerto City Land Office and secondary data derived from data documentation result and internet access. Sample used to calculate One Way Anova was 40 (forty) archives for each service type that was being observed.

KKP Web started to be implemented at Mojokerto City Land Office in late 2013. The implementation of land service by using KKP Web was conducted by following work flow at KKP Web application and time duration that has been set by the regulation. In its implementation, this KKP Web was encountered many technical and non technical constraints. In addition, based on result of field data processing, KKP Web seen from indicator of work settlement quantity and punctuality has not provided positive implication in service improvement compared to KKP Desktop system; however it has gave a positive implication if it was seen from other side in improving land service. The existence of computerization system (KKP Desktop and KKP Web) has brought a significant effect in improving quantity and punctuality of selling and purchase right transfer, but it did not give any effects on the service quantity improvement or service punctuality associated with measurement activities, such as land splitting and separation service.

Key Words: Land Service, KKP Web, Implication

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam aspek kehidupan manusia. Peranan tanah yang sangat penting tersebut menjadikan kebutuhan atas tanah semakin hari semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan tanah ini rentan menimbulkan permasalahan. Adanya permasalahan-permasalahan yang dapat ditimbulkan dari penguasaan dan pemilikan tanah ini mendorong negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah melalui adanya pendaftaran tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Tindak lanjut dari undang-undang tersebut adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Adanya jaminan kepastian hukum atas tanah mengakibatkan semakin banyaknya pemilik tanah yang mendaftarkan tanahnya, sehingga permohonan pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah akan semakin meningkat. Banyaknya permohonan

pendaftaran tanah ini menuntut adanya pelayanan publik yang berkepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

Pelayanan publik pada hakikatnya adalah amanah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Definisi pelayanan publik menurut undang-undang ini adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” Pengertian ini mempertegas bahwa pelayanan publik merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanannya dengan mengacu pada tata aturan perundangan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Upaya merespon undang-undang pelayanan publik telah menjadikan pertimbangan utama Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuat beberapa peraturan terkait dengan pelayanan pertanahan. Peraturan-peraturan ini disusun untuk memberikan pedoman terutama bagi kantor pertanahan seluruh Indonesia dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Peraturan terkait pelayanan pertanahan ini meliputi:

1. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pelayanan Pertanahan;

2. Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan dan Efisiensi Pelayanan di Bidang Pertanahan;
3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pelayanan Pertanahan;
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan; dan
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Locket Pelayanan Pertanahan.

BPN yang sejak tahun 2014 telah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan salah satu institusi pelayanan publik. Kedudukannya sebagai institusi pelayanan publik ini menjadikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. Kualitas pelayanan pertanahan merupakan salah satu tuntutan reformasi birokrasi sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di seluruh jajaran

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN perlu diintensifkan. Salah satu upaya meningkatkan kualitas yang dilakukan BPN adalah mengubah pola pelayanan masyarakat di kantor pertanahan dari sistem manual beralih ke sistem komputerisasi. Komputerisasi Kantor Pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mulai dilaksanakan sejak tahun 1997 yang dikenal dengan nama *Land Office Computerization* (LOC), atau dengan sebutan lain LOC *phase* I.

Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, BPN terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas peralatan maupun prosedur kerjanya melalui LOC *phase* IIA yang kemudian pada tahun 2004 sampai tahun 2006 menjadi LOC *phase* IIB. Proyek LOC merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Spanyol. Pada tahun 2010 LOC diubah istilahnya menjadi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). KKP adalah “suatu kantor pertanahan yang memanfaatkan dan mendayagunakan perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi sistem komputerisasi pertanahan secara efektif, efisien, dan terkendali.”¹ KKP merupakan suatu sistem pelayanan pertanahan yang telah berbasis komputer dengan data tekstual dan data spasial suatu bidang tanah yang telah terintegrasi dengan baik. Tujuan pelaksanaan komputerisasi pertanahan adalah menciptakan informasi yang akurat mengenai pemilikan dan penguasaan tanah, meningkatkan dan mempercepat pelayanan di bidang pertanahan, menghemat ruang penyimpanan data

¹ Slamet Muryono, dkk, “Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Pertanahan Berbasis Web di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang” *Jurnal Pertanahan Bhumi Nomor 7 Tahun 4*. (Yogyakarta: STPN Press, 2012) hlm. 18.

pertanahan dalam bentuk digital yang pada akhirnya akan terwujud tertib administrasi pertanahan.² Adanya pelaksanaan KKP ini menandakan bahwa telah terjadi transformasi layanan publik bidang pertanahan di kantor pertanahan, tidak ada lagi pelayanan permohonan sertipikat hak atas tanah secara manual. Proses permohonan sertipikat hak atas tanah dapat dimonitoring melalui komputer dan dapat dilakukan secara tertib dan berurutan. Selain itu, adanya KKP ini berdampak terbentuknya *database* pertanahan yang selalu *up to date* dan dapat digunakan dalam kegiatan pelayanan informasi pertanahan.

Seiring perkembangan waktu, pelayanan komputerisasi pertanahan bermigrasi menjadi sistem komputerisasi berbasis *web*, yang biasa disingkat dengan KKP *Web*. Pelayanan KKP *Web* tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sehingga adanya keluhan masyarakat terkait lamanya pelayanan yang dilakukan oleh kantor pertanahan dapat diminimalkan.

Kantor pertanahan kabupaten/kota merupakan ujung tombak dalam pelayanan pertanahan karena melalui kantor pertanahan kabupaten/kota inilah terjadinya pelayanan secara langsung kepada masyarakat terutama tentang penerbitan alat bukti hak atas tanah yaitu sertipikat. Oleh sebab itu, kantor pertanahan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

² Slamet Muryono, dkk, *Laporan Penelitian Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi di Badan Pertanahan Nasional*. (Yogyakarta, 2006) hlm. 20.

Kantor Pertanahan Kota Mojokerto merupakan salah satu kantor pertanahan di Indonesia yang telah menerapkan aplikasi *KKP Web*. Penerapan aplikasi ini mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2013. Sebelum adanya aplikasi *KKP Web* ini, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto juga telah menerapkan komputersisasi kantor pertanahan (*desktop*) yang dimulai pada tahun 2010.

Adanya peningkatan permohonan pelayanan pertanahan menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan pertanahan. Sebagaimana yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dengan jumlah permohonan peralihan hak jual beli, pemecahan dan pemisahan bidang tanah yang cukup banyak dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1 terkait jumlah permohonan pelayanan peralihan hak jual beli, pemecahan dan pemisahan bidang tanah di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto ketika masih manual (2009), *KKP Desktop* (2013), dan *KKP Web* (2014).

Tabel 1. Jumlah Permohonan Pelayanan Pemecahan, Pemisahan Bidang Tanah, dan Peralihan Hak Jual Beli

No.	Pelayanan Pertanahan	Manual (2009)	KKP Desktop (2013)	KKP Web (2014)
1	2	3	4	5
1.	Pemecahan Bidang Tanah	169	114	133
2.	Pemisahan Bidang Tanah	71	64	77
3.	Peralihan Hak Jual Beli	674	1392	1350

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Bulan Januari Tahun 2015

Migrasi dari sistem manual ke aplikasi *KKP Desktop* kemudian ke *KKP Web* membawa perubahan dalam sistem pelayanan pertanahan. Perubahan-perubahan ini diharapkan membawa dampak positif bagi pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Implikasi KKP Web Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur)**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah dalam dua pertanyaan penelitian.

1. Bagaimana penerapan aplikasi *KKP Web* di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto?
2. Bagaimana implikasi penerapan aplikasi *KKP Web* terhadap pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan pokok penelitian agar tidak terjadi kerancuan dan untuk membatasi tingkat kedalaman dan luasan cakupan penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pelayanan pertanahan yang diteliti adalah permohonan pelayanan peralihan hak jual beli, pemecahan dan pemisahan bidang tanah sebelum program *KKP Web* (ketika masih manual) periode tahun 2009.
2. Pelayanan pertanahan yang diteliti adalah permohonan pelayanan peralihan hak jual beli, pemecahan dan pemisahan bidang tanah sebelum program *KKP Web* (ketika *KKP Desktop*) periode tahun 2013.

3. Pelayanan pertanahan yang diteliti adalah permohonan pelayanan peralihan hak jual beli, pemecahan dan pemisahan bidang tanah setelah program *KKP Web* dilaksanakan periode tahun 2014.
4. Indikator yang diteliti adalah kuantitas penyelesaian pekerjaan permohonan peralihan hak jual beli, pemecahan dan pemisahan bidang tanah, dan ketepatan waktu yang dihasilkan oleh sistem manual, *KKP Desktop*, dan *KKP Web*.

Pemilihan permohonan pelayanan pertanahan yaitu peralihan hak jual beli, pemecahan dan pemisahan bidang tanah atas dasar pertimbangan jenis pelayanan ini yang paling banyak di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Selain itu, peneliti mengambil ketiga sampel pelayanan ini untuk mengetahui apakah *KKP Web* berimplikasi meningkatkan pelayanan atautkah tidak dilihat dari segi kuantitas penyelesaian pekerjaan dan ketepatan waktu pada jenis pelayanan pertanahan yang berbeda (pelayanan yang ada kegiatan pengukuran karena terjadi perubahan data fisik dan pelayanan yang tidak ada kegiatan pengukuran). Penelitian dilakukan dalam kurun waktu satu tahun untuk masing-masing sistem pelayanan didasari pertimbangan keterbatasan waktu penelitian dan untuk menyamakan waktu dengan penerapan *KKP Web* di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto yang baru dilaksanakan selama satu tahun.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

- a. mengetahui penerapan aplikasi *KKP Web* di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto;
- b. mengetahui implikasi penerapan aplikasi *KKP Web* terhadap pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

- a. bahan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan program aplikasi *KKP Web*;
- b. menambah khasanah referensi untuk literatur tentang pelayanan pertanahan menggunakan *KKP Web*.

E. Kebaruan Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan mengenai karya ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini, sejauh yang diketahui terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Rahayu Puji Lestari (2009) meneliti tentang pelaksanaan komputerisasi (LOC) di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dan perbandingan produktivitas pelayanan sebelum dan setelah dilaksanakan LOC. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah pelayanan dengan menggunakan aplikasi LOC telah diterapkan pada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan, serta Sub Bagian Tata

Usaha, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala. Penerapan aplikasi LOC belum meningkatkan pelayanan pertanahan karena terjadi penurunan produktivitas sebesar 3%. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada obyek yang diteliti yaitu KKP *Web*. Selain itu, terdapat perbedaan pada metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kombinasi, serta pada lokasi yang berbeda yaitu Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.

M. Hady Arman R. (2009) meneliti tentang perkembangan komputerisasi dan dampak yang ditimbulkan dalam perkembangan sistem komputerisasi di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif yang diambil dari data kualitatif maupun data kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah adanya perkembangan sistem komputerisasi yang dapat dilihat dengan adanya presensi pegawai dan kamera CCTV tahun 2007, digitalisasi pelayanan loket (2009), penggunaan aplikasi justisia (2009), Aplikasi LOC IIB (2009) serta dampak adanya LOC IIB yaitu terjadi peningkatan kuantitas pelayanan yang belum signifikan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada obyek yang diteliti yaitu KKP *Web* dengan lokasi penelitian yang berbeda. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan data kuantitatif yang diolah dengan menggunakan *Anova* untuk mengukur indikator ketepatan waktu. Data kuantitatif yang dihasilkan oleh peneliti Arman menggunakan data persentase dari jumlah permohonan dan penyelesaian pekerjaan.

Jonverson Broito Tamba (2011) meneliti tentang penerapan aplikasi KKP dalam meningkatkan produktivitas pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kupang. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan hasil penelitiannya adalah KKP telah diterapkan di semua seksi dan subbagian di Kantor Pertanahan Kota Kupang dan terjadi peningkatan produktivitas pelayanan setelah digunakannya KKP sebesar 30,75%. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah obyek yang diteliti yaitu KKP *Web*, dengan lokasi penelitian dan metode yang berbeda.

Slamet Muryono, dkk. meneliti tentang efektivitas dan efisiensi layanan berbasis *web* di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan survei. Hasil penelitiannya adalah pelayanan pertanahan berbasis *web* efektif dan sangat efisien. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian, metode penelitian yang digunakan, jenis pelayanan yang diteliti. Peneliti Slamet Muryono, dkk. menggunakan pelayanan perubahan (peningkatan) hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa ganti blanko sebagai obyek penelitiannya. Peneliti menggunakan pelayanan peralihan hak jual beli, pemecahan dan pemisahan bidang tanah sebagai obyek penelitiannya.

Arsyidinul (2013) meneliti tentang penerapan KKP *Web* di Kantor Pertanahan Kota Palopo dan perbandingan pekerjaan pelayanan pertanahan sebelum dan sesudah KKP *Web* dari segi waktu, biaya, dan

kualitas data. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah pembangunan basis data berjalan secara bertahap dan aplikasi KKP *Web* meningkatkan pelayanan pertanahan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode yang digunakan, lokasi penelitian, dan jenis pelayanan yang diteliti. Jenis pelayanan yang diteliti oleh peneliti Arsydinul adalah pendaftaran tanah pertama kali dan jenis pelayanan yang diteliti oleh peneliti adalah peralihan hak jual beli, pemecahan dan pemisahan bidang tanah. Selain itu, indikator yang digunakan oleh peneliti adalah kuantitas penyelesaian pekerjaan dan ketepatan waktu. Peneliti membandingkan tiga sistem yaitu sebelum KKP *Web* dilaksanakan (ketika manual maupun KKP *Desktop*) dan setelah dilaksanakannya KKP *Web*.

Mahenggar Paulina Puspitasari (2014) meneliti tentang pelaksanaan pelayanan pertanahan dengan menggunakan KKP *Web* di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan peran KKP *Web* dalam mempersiapkan pelayanan prima. Metode yang digunakan adalah deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah pelayanan pertanahan belum mencapai maksimal karena pembangunan basis data untuk data spasial masih 20% dan aplikasi KKP *Web* bisa digunakan untuk mempersiapkan pelayanan prima. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Selain itu, pada penelitian Mahenggar tidak diteliti mengenai perbandingan antara sebelum ataupun sesudah dilaksanakannya KKP *Web*

sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kebaruan penelitian lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penelitian yang Berkaitan dengan Komputerisasi Pertanahan oleh Peneliti Terdahulu

No.	Penulis dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Rahayu Puji Lestari (2009) Pelaksanaan Komputerisasi Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah	a. Mengetahui pelaksanaan komputerisasi pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. b. Mengetahui peningkatan pelayanan pertanahan setelah dilakukan sistem komputerisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.	Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.	a. Pelaksanaan pelayanan pertanahan dengan aplikasi LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang sudah diterapkan pada Seksi HTPT, SPP dan Subbag TU. b. Penerapan aplikasi LOC belum dapat meningkatkan pelayanan pertanahan yang ditunjukkan dengan penurunan produktivitas pelayanan sebesar 3%.
2.	M. Hady Arman R. (2009) Perkembangan Sistem Komputerisasi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	a. Mengetahui Perkembangan Sistem Komputerisasi Pelayanan Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. b. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam perkembangan system komputerisasi pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Makassar	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan populasi dan sampel. Teknik Analisa yang digunakan yaitu deskriptif komparatif dengan membuat uraian dari data yang diperoleh, baik data kualitatif maupun data kuantitatif	a. Perkembangan sistem komputerisasi dapat dilihat dengan adanya presensi pegawai dan kamera CCTV tahun 2007, digitalisasi pelayanan loket (2009), penggunaan aplikasi justisia (2009), Aplikasi LOC IIB (2009). b. Dampak perkembangan sistem komputerisasi yakni adanya peningkatan kuantitas pelayanan yang belum signifikan setelah aplikasi LOC IIB.
3.	Jonverson Broito Tamba (2011) Komputerisasi Kantor Pertanahan Dalam Meningkatkan Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. Mengetahui penerapan komputerisasi kantor pertanahan dalam peningkatan pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Kupang. b. Mengetahui apakah penerapan komputerisasi kantor pertanahan dapat meningkatkan	Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif	a. Pelaksanaan pelayanan dengan aplikasi komputerisasi kantor pertanahan sudah diterapkan di semua seksi tetapi pada pelaksanaannya baru berjalan pada seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan.

Bersambung...

Tabel 2 (sambungan)

1	2	3	4	5
		<p>produktivitas pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kupang.</p> <p>c. Mengetahui kendala yang dihadapi pada penerapan komputerisasi kantor pertanahan</p>		<p>b. Terjadi peningkatan produktivitas terhadap penyelesaian permohonan pelayanan sebesar 30,75%.</p> <p>c. Kendala yang dihadapi pada penerapan komputerisasi kantor pertanahan yaitu berkaitan dengan SDM, karena hanya beberapa pegawai yang mengikuti pelatihan KKP.</p>
4.	Slamet Muryono, dkk. (2012) Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Pertanahan Berbasis Web di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang	<p>a. Mengetahui efektivitas pelayanan pertanahan berbasis Web.</p> <p>b. Mengetahui efisiensi pelayanan pertanahan berbasis Web.</p>	Metode penelitian adalah metode survei dengan pendekatan kualitatif.	<p>a. Pelayanan pertanahan berbasis Web dikategorikan sebagai pelayanan yang efektif.</p> <p>b. Pelayanan pertanahan berbasis Web dikategorikan sebagai pelayanan yang sangat efisien.</p>
5.	Arsyidinul (2013) Implikasi Program Aplikasi KKP Web Terhadap Percepatan Pelayanan Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Palopo)	<p>a. Mengetahui pembangunan basis data dan implementasi program aplikasi KKP Web terhadap pekerjaan pelayanan pertanahan.</p> <p>b. Mengetahui perbandingan pekerjaan pelayanan pertanahan sebelum dan setelah pelaksanaan program aplikasi KKP Web, ditinjau dari segi waktu penyelesaian pekerjaan, biaya, dan kualitas data.</p>	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian analisis deskriptif. Teknik analisis data dengan wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen sebelum dan setelah pelaksanaan program aplikasi KKP Web. Sehingga hasil dari data tersebut diuraikan dan dibuat kesimpulan.	<p>a. Penggunaan aplikasi KKP Web di Kantor Pertanahan Kota Palopo dimulai tahun 2011. Selama dua tahun berjalan persentase basis data Geo-KKP yang dihasilkan sebesar 53,24 persen.</p> <p>b. Implikasi yang dihasilkan yaitu meningkatkan pekerjaan pelayanan, karena adanya <i>early warning system</i> dan memberikan kejelasan, kepastian dan transparansi dari segi waktu dan posisi berkas permohonan.</p>
6.	Mahenggar Paulina Puspitasari (2014) Penggunaan Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan Berbasis Web Dalam Rangka Persiapan Menuju Pelayanan Prima (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten	<p>a. Mengetahui pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dengan menggunakan aplikasi KKP Web.</p> <p>b. Mengetahui bahwa aplikasi KKP Web dapat digunakan untuk</p>	Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen.	a. Semua jenis kegiatan pelayanan di bidang pertanahan sudah dilayani dengan menggunakan aplikasi KKP Web dan pelaksanaan pelayanan pertanahan masih belum mencapai maksimal karena pembangunan

Bersambung...

Tabel 2 (sambungan)

1	2	3	4	5
	Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)	mempersiapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar melakukan pelayanan prima.		basis data untuk data spasial masih 20%. b. Inovasi pelayanan aplikasi KKP <i>Web</i> dapat dijadikan sebagai persiapan menuju pelayanan prima di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, setelah adanya aplikasi KKP <i>Web</i> penerapan standar pelayanan menjadi lebih jelas, keterbukaan mengenai biaya, waktu, prosedur, dan persyaratan permohonan pendaftaran pelayanan pertanahan menjadi lebih transparan karena telah dipublikasikan.
7.	Suci Paramita Sari (2015) Implikasi KKP <i>Web</i> Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur)	a. Mengetahui penerapan aplikasi KKP <i>Web</i> di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. b. Mengetahui implikasi penerapan aplikasi KKP <i>Web</i> terhadap pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.	Metode penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan metode kombinasi dengan pendekatan <i>sequential explanatory</i> untuk menjawab rumusan masalah kedua.	a. KKP <i>Web</i> telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Mojokerto sejak bulan Desember tahun 2013. Alur kerja pelayanan pertanahan yang meliputi berkas PNBPN dan APBD/APBN rupiah murni dijalankan berdasarkan alur kerja yang ada dalam aplikasi KKP <i>Web</i> . Pelaksanaan KKP <i>Web</i> di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto mengalami beberapa kendala terkait faktor teknis dan non-teknis. b. KKP <i>Web</i> dilihat dari indikator kuantitas penyelesaian pekerjaan dan ketepatan waktu, belum memberikan implikasi positif dalam peningkatan pelayanan apabila dibandingkan dengan sistem sebelumnya, yaitu KKP <i>Desktop</i> , namun KKP

Bersambung...

Tabel 2 (sambungan)

1	2	3	4	5
				<p><i>Web</i> telah memberikan implikasi yang positif dilihat dari sisi yang lain dalam meningkatkan pelayanan pertanahan. Adanya sistem komputerisasi (KKP <i>Desktop</i> dan KKP <i>Web</i>) membawa pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kuantitas dan ketepatan waktu pada pelayanan peralihan hak jual beli, namun tidak memberikan pengaruh peningkatan kuantitas ataupun ketepatan waktu pada pelayanan yang berhubungan dengan kegiatan pengukuran, seperti pelayanan pemecahan dan pemisahan bidang tanah.</p>

Sumber: Pencarian Pustaka Peneliti, Bulan Januari Tahun 2015

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aplikasi KKP *Web* mulai dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada akhir tahun 2013. Pelaksanaan pelayanan pertanahan dengan menggunakan aplikasi ini dilakukan dengan mengikuti alur kerja pada KKP *Web* dan dengan durasi yang telah ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010. Pada pelaksanaannya, sistem KKP *Web* di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dihadapkan pada beberapa kendala yang terkait dengan faktor teknis maupun non-teknis.

Indikator kuantitas penyelesaian pekerjaan dan ketepatan waktu untuk mengukur peningkatan pelayanan pertanahan dengan menggunakan sistem komputerisasi KKP *Web* menunjukkan tidak mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan sistem KKP *Desktop*, namun mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan sistem manual. Meskipun begitu, sistem pada aplikasi KKP *Web* memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem yang lain, seperti informasi berkas lebih transparan dan lebih mudah dilakukan; memiliki sistem peta tunggal yang bisa mencegah adanya tumpang tindih bidang tanah; mempunyai keseragaman dalam hal format laporan maupun sistem aplikasi yang digunakan, sehingga tidak terjadi perbedaan pelayanan di kantor pertanahan seluruh Indonesia; memudahkan dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap kinerja kantor pertanahan, sehingga bisa dilakukan

evaluasi; dan mudah dalam mengakses aplikasinya karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun *user* (pengguna KKP *Web*) berada.

Adanya perubahan sistem pelayanan dari manual ke komputerisasi di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelayanan pertanahan yang berhubungan dengan kegiatan pengukuran, seperti pelayanan pendaftaran pertama kali, pemecahan dan pemisahan bidang tanah, namun mengalami peningkatan secara signifikan pada pelayanan lain, seperti pelayanan peralihan hak.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan Sumberdaya Manuasia (SDM), baik secara kuantitas maupun kualitas di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto guna mempersiapkan SDM yang terampil dan handal dalam pemanfaatan teknologi.
2. Kepedulian dari setiap pegawai, terutama dari pimpinan Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dalam upayanya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan.
3. Koordinasi antara Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Pusdatin, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan kantor pertanahan lainnya perlu ditingkatkan dalam rangka menemukan solusi yang tepat apabila terjadi kendala atau masalah yang dihadapi.
4. Perlu adanya pengadaan *genset* di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan kedua belas. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Az, Lukman Santoso. 2014. *Penemuan-Penemuan Spektakuler Pengubah Wajah Dunia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: DIVA Press
- Creswell, John W. 2003. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Second Edition. California: Sage Publication
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media
- Hartono. 2008. *SPSS 16.0 Analisis Data Statistika dan Penelitian*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Cetakan kedua puluh lima. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Cetakan keenam. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Aristiono. 2010. *Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif*. (tidak diterbitkan). Yogyakarta
- Simarmata, Janner. 2007. *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*. C.V. Yogyakarta: Andi Offset
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- . 2013. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan kedua puluh dua. Bandung: Alfabeta
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sutedi, Adrian. 2009. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika

Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. 2012. *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta

Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Karya Ilmiah

Arman, M. Hadi. 2009. *Skripsi Perkembangan Sistem Komputisasi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan*. (tidak diterbitkan). Yogyakarta

Arsydinul. 2013. *Skripsi Implikasi Program Aplikasi KKP-Web Terhadap Percepatan Pelayanan Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Palopo)*. (tidak diterbitkan). Yogyakarta

Lestari, Rahayu Puji. 2009. *Skripsi Pelaksanaan Komputisasi Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah*. (tidak diterbitkan). Yogyakarta

Muryono, Slamet dkk. 2006. *Laporan Penelitian Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi di Badan Pertanahan Nasional*. (tidak diterbitkan). Yogyakarta

_____. 2012. "Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Pertanahan Berbasis Web di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang" *Jurnal Bhumi Nomor 7 Tahun 4 September 2012*. Yogyakarta: STPN Press

Puspitasari, Mahenggar Paulina. 2014. *Skripsi Penggunaan Aplikasi Komputisasi Kantor Pertanahan Berbasis Web dalam Rangka Persiapan Menuju Pelayanan Prima (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)*. (tidak diterbitkan). Yogyakarta

Rini, Purna. 2013. *Jurnal Perancangan Sistem Informasi Praktek Kerja Industri (Studi Kasus : SMK Model PGRI 1 Mejiayan)*. Program Studi Teknik Informatika STT Dharma Iswara Madiun, <http://dharma-iswara.ac.id/v3/download/jurnalPurnaRini%2009211025.pdf>, diakses tanggal 12 Desember 2014 pukul 20.15 WIB

Rustam, H. Muhammad. 2012. *Jurnal Kesiapan Masyarakat Menuju Era Masyarakat Informasi (Studi di Kabupaten Parigi Provinsi Sulawesi Tengah) Volume 15 Nomor 1*. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar. <http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/bbppki-makassar/download/Volume%2015%20Nomor%201%20%28Edisi%20April%202012%29.pdf>, diakses tanggal 12 Desember 2014 pukul 21.10 WIB

Tamba, Jonverson Broito. 2011. *Skripsi Komputerisasi Kantor Pertanahan Dalam Meningkatkan Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*. (tidak diterbitkan). Yogyakarta

Laporan

Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. *Evaluasi Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Mojokerto Tahun 2014*. (tidak diterbitkan). Mojokerto

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Locket Pelayanan Pertanahan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pelayanan Pertanahan

Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pelayanan Pertanahan

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan dan Efisiensi Pelayanan di Bidang Pertanahan

Website

<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/mojokerto.pdf>, diakses tanggal 25 Mei 2015 pukul 14.25 WIB

http://mojokertokota.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kota-Mojokerto-2014.pdf, diakses tanggal 15 Mei 2015 pukul 20.05 WIB

http://mojokertokota.go.id/media.php/profil/kondisi_geo, diakses tanggal 19 Mei 2015 pukul 11.45 WIB

http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/index.asp?mod=_fullart&idart=120, diakses tanggal 1 Juni 2015 pukul 16.15 WIB

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Nur%20Insani,%20M.Sc/LOGIKA%20-%20NEGASI,%20DISJUNGSI,KONJUNGSI,%20IMPLIKASI%20DAN%20BIIMPLIKASI.pdf>., diakses tanggal 1 Februari 2015 pukul 15.45 WIB.

<http://www.bpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Komputerisasi-Layanan-Pertanahan>, diakses tanggal 1 Desember 2014 pukul 21:00 WIB

<http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/implication?showCookiePolicy=true>, diakses tanggal 1 Februari 2015 pukul 16.10 WIB